

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, A. (2008). Sociolinguistik: Teori, peran, dan fungsinya terhadap kajian bahasa sastra. *LiNGUA: Jurnal Ilmu Bahasa Dan Sastra*, 3(1).
- Abqa, L. N., Rachmawati, R., & Ubaidillah, R. (2023). Analisis Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilu di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 10(2), 145.
- Adibah, I. Z. (2017). Pendekatan Sosiologis Dalam Studi Islam. *INSPIRASI (Jurnal Kajian Dan Penelitian Pendidikan Islam)*, 1(1), 1–20.
- Afifuddin, M. (2020). Membumikan Pengawasan Pemilu: Mozaik Pandangan dan Catatan Kritis dari Dalam. In *Elex Media Komputindo*.
- Akbar, T. (2022). Efektivitas Pengawasan Bawaslu Kota Tangerang Selatan Di Masa Pandemi: Studi Kasus Pilkada Kota Tangerang Selatan Tahun 2020. *Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarifudin*.
- Alaydrus, A., Sos, S., Jamal, M. S., Nurmiyati, N., & S IP, M. I. P. (2023). *Pengawasan Pemilu: Membangun Integritas, Menjaga Demokrasi*. Penerbit Adab.
- Antara News Bengkulu. (2024). Bawaslu beri rekomendasi ke KPU Bengkulu terkait pelanggaran kampanye. Diakses di kota Bengkulu 27 Mei 2025 dari <https://bengkulu.antaranews.com/berita/372558/bawaslu-beri-rekomendasi-ke-kpu-bengkulu-terkait-pelanggaran-kampanye>
- Antara News Bengkulu. (2024). Bawaslu Bengkulu klarifikasi dugaan pelanggaran kampanye TKD Anies. Diakses di kota Bengkulu 27 Mei 2025 dari <https://bengkulu.antaranews.com/berita/326028/bawaslu-bengkulu-klarifikasi-dugaan-pelanggaran-kampanye-tkd-anies>,
- Antara News. (2024). Bawaslu: Kampanye Prabowo di Bengkulu langgar undang-undang. Diakses di kota Bengkulu 27 Mei 2025 dari <https://pemilu.antaranews.com/berita/3955902/bawaslu-kampanye-prabowo-di-bengkulu-langgar-undang-undang>
- Antonio, J., Yani, P., Hakim, C. M., Tanuwijaya, N. D., Calvin, C., Tang, J., Christina, C., Fransisca, V., Joscelin, J., & Irawan, A. (2024). Kegiatan Praktek Pengawasan Pencegahan Dan Pelanggaran Pemilu 2024. *Journal Of Human And Education (JAHE)*, 4(5), 816–.
- Arpandi, A. (2023). Media Online dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilihan Umum (Pemilu). *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 84.
- Arta, K. S. (2020). Sistem Pemerintahan Demokrasi Liberal Dan Tercapainya

- Pemilihan Umum I Pada Tahun 1955 Di Indonesia. *Jurnal Widya Citra*, 1(2), 69–8.
- Asih, G. Y., Widhiastuti, H., & Dewi, R. (2018). *Stres kerja*. . Semarang: Semarang University Press.
- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia*.
- Azmy, A. S., & Harahap, H. G. (2022). Akuntabilitas komisi pemilihan umum (KPU) dalam pendaftaran dan verifikasi sistem informasi partai politik (SIPOL) pada pemilu tahun 2019. *INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia Dan Global*, 3(2), 37–4.
- Azzahra, A. N., Janwari, Y., & Rizal, L. F. (2024). Implikasi Konflik Penggelembungan Suara Sirekap Terhadap Demokrasi yang Jurdil dalam Pemilu 2024 Perspektif Siyasa Dusturiyah. *UNES Law Review*, 6(4), 1181.
- Basuki, U. (2020). *Parpol, Pemilu dan Demokrasi: Dinamika Partai Politik dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Perspektif Demokrasi*. *Kosmik Hukum*, 20(2), 81–94.
- Fauziah, A. R., Bimantara, C. S., Bahrenina, K. A., & Pertiwi, Y. E. (2023). Meningkatkan Kualitas Pemilu Serentak Tahun 2024 Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital. *Jurnal Kajian Konstitusi*, 3(1), 51–75.
- Gultom, M. M. (2023). Pendidikan pengawasan pemilu bagi masyarakat untuk mewujudkan pemilu berintegritas. *Ensiklopedia Education Review*, 5(1), 6–12.
- Hadiz & Robison. (2017). Competing Populisms in Post-Authoritarian Indonesia. *International Political Science Review*, 38(4), 488.
- Hadiz, V. R. (2018). *Indonesia's Year of Democratic Setback: Towards a New Phase of Deepening Illiberalism?* *Journal of Contemporary Asia*, 48(4), 636–658.
- Harian Rakyat Bengkulu. (2024). Banyak pelanggaran di Pemilu 2024, Bawaslu Bengkulu awasi ketat Pilkada. Diakses di kota Bengkulu 27 Mei 2025 dari <https://harianrakyatbengkulu.bacakor.co/read/9852/banyak-pelanggaran-di-pemilu-2024-bawaslu-bengkulu-awasi-ketat-pilkada>
- Harmoko, R., & Afif, Z. (2021). Peranan Badan Pengawasan Pemilu Terhadap Sengketa Pemilu Tahun 2019 (Studi di Kantor Bawaslu Kabupaten Batubara). *Jurnal Pionir*, 7(1).
- Hayckel, E., Paskarina, C., & Solihah, R. (2024). *PERAN PRINSIP-PRINSIP FUNDAMENTAL PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM MENINGKATKAN INTEGRITAS BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM*.
- Henry, N. (2010). *Public Administration and Public Affairs (11th ed.)*.

- Hidayat, A., & Siregar, R. (2020). Media Sosial dan Perubahan Lanskap Politik di Indonesia. *Jurnal Ilmu Politik*, 21(2), 140.
- Huntington, S. P. (1991). Democracy's third wave. *Journal of Democracy*, 2(2), 12–.
- Idris, S. (2024). Pengaturan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum 2024. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(1), 914–.
- Imawan, R. P. (2020). Kerangka Evaluasi Pilkada: Evaluasi Pilkada Serentak Melalui Kerangka Integritas Pemilu. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 3(2), 159–.
- Iqbala, M., & Wardhanib, S. B. E. (2020). Integritas Penyelenggara Pemilu Ad-hoc, Praktik Electoral Fraud oleh Panitia Pemilihan di Provinsi Sumatera Utara. *Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 1(2), 3.
- Jurdi, F. (2018). *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Kencana.
- Kodiyat, B. A. (2019). Fungsi Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Kota Medan. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 5(1).
- Kusuma, F. C. (2012). *Peran KPU Kabupaten Klaten dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010*.
- Labolo, M., & Ilham, T. (2015). *Partai politik dan sistem pemilihan umum di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Leodita, A., Prastika, A., & Puspaningrum, P. (2024). Meningkatkan Integritas Pemilu: Mengevaluasi Peran Dan Tantangan Badan Pengawas Pemilu Di Boyolali, Indonesia. *Journal of Contemporary Law Studies*, 1(4), 261–.
- Linton, R. (1936). *The study of man: An introduction*.
- Magriasti, L. (2011). *Arti penting partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik di daerah: analisis dengan teori Sistem David Easton*.
- Mahfud, M. D., & Nurrohman, H. (2020). *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia: Tinjauan Konstitusional dan Implementasi Undang-Undang Pemilu*. Pustaka Pelajar.
- Mahmudah, H., Suhariyanto, D., Fajrina, R. M., Marwenny, E., Husnita, L., Nazmi, R., Iswardhana, M. R., Wahyuni, S., & Citra, H. (2023). *PENGANTAR KEWARGANEGARAAN: Membentuk Warga Negara Yang Berkualitas*.
- Mahpudin, M. (2019). Pemanfaatan Teknologi Pemilu Di Tengah Era Post Truth: Antara Efisiensi dan Kepercayaan. *Jurnal PolGov*, 1(2), 157–.
- Maryam, E. W. (2019). *Psikologi Sosial Penerapan Dalam Permasalahan Sosial*.
- Mikhail, M. H., Zahran, M. H., Arum, T. A. S., Navya Kirana, S., & Lubis, M. (2023). Identifikasi Best Practice Knowledge Management pada Badan

- Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). *SEIKO: Journal of Management & Business*, 6(2).
- Milles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis a methods sourcebook*. SAGE Publications, Inc.
- Mozaffar, S., & Schedler, A. (2002). *The comparative study of electoral governance introduction*. (Internatio).
- Muhammad, F. G. N. (2023). *Strategi Badan Pengawas Pemilu Dalam Pencegahan Pelanggaran Politik Uang Pada Pemilu 2024 (Studi Di Bawaslu Provinsi Lampung)*.
- Mulia, I. A. (2024). Peran Humas Bawaslu Kota Sabang Dalam Meningkatkan Pengawasan Pemilu Partisipatif. *Universitas Islam Negeri Ar-Raniry*.
- Muntuan, J. R. (2018). Pengawasan Pemilihan Umum Oleh Badan Pengawas Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Serta Peraturan Pelaksanaannya. *Lex Administratum*, 6(3).
- Nabila, A. (2023). *Laporan Tahunan Bawaslu Kota Bengkulu: Tantangan dan Strategi Pengawasan Pemilu 2024*.
- Nasarudin, N., Rachmawati, D. A., Mappanyompa, M., Eprillison, V., Misrahayu, Y., Halijah, H., Afifa, R. N., Mustari, M., Mutmainah, S., & Selly, O. A. (2024). *Pengantar pendidikan*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Nasution, I., & Tarigan, U. (2017). *Analisis Pemilihan Kepala Desa Serentak Terhadap Demokrasi Local di Desa Tanjung Kabupaten Aceh Tamiang (Studi Kasus Pada Kantor Kepala Desa Tanjung Kabupaten Aceh Tamiang)*.
- Ngimadudin, N., & Supriadi, S. (2024). Pemikiran Kritis dalam Rekrutmen Penyelenggara Pemilu Menggunakan Sistem online Perspektif Hukum Tata Negara. *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 2(2), 97–1.
- Nurhasim, M. (2021). *Pengawasan Partisipatif dan Kualitas Demokrasi Lokal. Jurnal Demokrasi dan Pemilu*, 9(2), 134–147.
- Padilah, K., & Irwansyah, I. (2023). Solusi terhadap money politik pemilu serentak tahun 2024: mengidentifikasi tantangan dan strategi penanggulangannya. *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 9(1), 236–.
- Pardede, N. S. (2022). *KAJIAN YURIDIS KEDUDUKAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA*.
- Patricia, F., & Yapin, C. (2019). *Penguatan Mekanisme Penyelenggaraan Pemilihan Umum Melalui Rekonstruksi Kesadaran Penyelenggara Pemilihan Umum. Binamulia Hukum*. 8(2), 155–.

- Prasetyo, A., & Wijayanto, A. (2021). Partisipasi Publik dalam Pengawasan Pemilu: Studi Perbandingan Demokrasi di Asia Tenggara. *Jurnal Pemilu Dan Demokrasi*, 5(1), 22–3.
- Prayoga, S. (2021). Penggunaan E-Voting dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Serentak Tahun 2024 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. *Awasia: Jurnal Pemilu Dan Demokrasi*, 1(2), 160–.
- Primadi, A., Efendi, D., & Sahirin, S. (2019). Peran Pemilih Pemula Dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif. *Journal of Political Issues*, 1(1), 63–73. *Journal of Political Issues*, 1(1), 63–73.
- Purnomo, A. (2006). *Teori peran laki-laki dan perempuan*.
- Richardson, J. T., & Robbins, T. (2010). *Monitoring and surveillance of religious groups in the United States. In The Oxford handbook of church and state in the United States (pp. 353–369)*.
- Riskiyono, J. (2013). Hak Publik Berpartisipasi Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilu Demokratis. *Jurnal Pemilu Dan Demokrasi*, 6, 115–144.
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2017). *Perilaku Organisasi* (Edisi 16.).
- Saleh, A. M. (2016). Tantangan dan Solusi dalam Peningkatan Partisipasi Pemilih pada Pemilu di Indonesia. *Jurnal Thengkyang*, 1(1).
- Santoso, T., & Budhiati, I. (2021). *Pemilu di Indonesia: kelembagaan, pelaksanaan, dan pengawasan*.
- Saputra, A. R., Gunati, M., Miliyandra, E. R. F., Firsanti, E. R., & Haryono, T. A. (2024). *Legal Politics in the 2024 Election Era in Indonesia*.
- Sari, A. K., & Sirozi, M. (2023). Politik Pendidikan Islam Indonesia Masa Reformasi (1998-Sekarang). *Tarbawy: Jurnal Pendidikan Islam*, 10(1), 20–.
- Sawir, M. (2020). *Birokrasi Pelayanan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Deepublish.
- Sembiring, W. M. (2014). Persepsi Konstituen terhadap Anggota DPRD dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. 2(2), 119–132. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, Sembiring,.
- Setiawan, B. (2021). Tantangan Demokrasi di Era Digital: Disinformasi dan Politik Identitas dalam Pemilu 2024. *Jurnal Politik Dan Pemerintahan*, 12(3), 187.
- Setiawan, I. (2024). *PENGAWASAN PEMERINTAHAN Dalam Ulasan Teori Dan Praktek*.
- Setyono, J. (2015). Good Governance Dalam Perspektif Islam (Pendekatan Ushul Fikih: Teori Peningkatan Norma). *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan*

Syariah, 6(1), 25–4.

Simatupang, Y. (2024). DINAMIKA POLITIK DAN PILKADA DI KOTA KENDARI: Analisis Pengaruh Media Sosial dalam Kampanye Politik Lokal. *Journal Publicuho, Journal Pu*.

Soekanto, S. (2002). *Teori Peranan*.

Soekanto, S. (2014). *Sosiologi Suatu Pengantar (Edisi Revisi)*.

Solihah, R., Bainus, A., & Rosyidin, I. (2018). Pentingnya Pengawasan Partisipatif dalam mengawal pemilihan umum yang demokratis. *Jurnal Wacana Politik*, 3(1), 14–2.

Stiglitz, J. E., & Schmidt, T. (2002). *Die Schatten der Globalisierung*.

Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.

Suhenty, L. (2024). *INOVASI PENGAWASAN Pemilu 2024 Refleksi Kinerja Seorang Pengawas Pemilu*. Penerbit Lawwana.

Sukma, Y., Khairunisa, F., Safitri, S. R., Febrian, M. H., Rahmadani, S., Williyas, A., & Sari, S. (2024). Peran Kelompok Kaliber Dalam Pengawasan Pemilu Tahun 2024 Untuk Mewujudkan Demokrasi Bersih. *Urnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 5(2), 1795.

Sumardi, S. (2022). Penguatan Sistem Pengawasan dalam Penyelenggaraan Tahapan Pemilu 2024. *Journal of Government Insight*, 2(2), 210–.

Surbakti, R., & Fitrianto, H. (2015). *Transformasi Bawaslu dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu*.

Sururama, R., & Amalia, R. (2020). *Pengawasan pemerintahan*.

Sutriyanti, N. K. (2016). Peningkatan Mutu Pendidikan Karakter Melalui Peran Orang Tua Dalam Keluarga. *Jurnal Penjaminan Mutu*, 2 (01), 14.

Taali, M., Darmawan, A., & Maduwinarti, A. (2024). *Teori dan Model Evaluasi Kebijakan: Kajian kebijakan kurikulum pendidikan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Tammu, L. (2023). Analisis yuridis konsep pemilihan umum serentak di Indonesia. *Doktrina: Journal of Law*, 6(2), 118–.

Tarigan, R. S. (2024). *Reformasi Hukum Tata Negara: Menuju Keadilan dan Keseimbangan. Ruang Berkarya*.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dapat diakses melalui situs resmi Mahkamah Konstitusi RI

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Wardhani, I., Pratama, R., & Susanto, B. (2022). The Role of Social Media in Political Campaigns: A Study on the 2024 Indonesian General Election. *Indonesian Journal of Political Science*, 14(2), 45-.

Weber, M. (1947). *The Theory of Social and Economic Organization*. Translated by A.M. Henderson & Talcott Parsons.

Whitchurch, G. G., & Constantine, L. L. (1993). *Systems theory*. In *Sourcebook of family theories and methods: A contextual approach* (pp. 325–355). Springer.

Wiatrowski, M. D. (1978). *Social control theory and delinquency*.

Wijaya, B. A., & Zulherawan, M. (2024). Strategi Bawaslu Kota Pekanbaru Dalam Mencegah Kecurangan Politik Uang Dalam Pemilihan Umum 2024. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 1672.

Yasin, R. (2022). Hak Konstitusional Penegakan Hak Politik Pemilih Dalam Pemilu Serentak 2024 Berdasarkan Konstitusi: KPU, Bawaslu, DKPP, dan MK. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 4(2), 186–.

Yunus, E. Y., Fadilah, S. N., Setyowati, I. N. C., Karimah, Z., Lestari, M. G., & Amrullah, M. J. (2024). Studi Kasus Persepsi Masyarakat Terhadap Administrasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak th. 2024 di Kabupaten Probolinggo. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 1134.

L A M P I R A N

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

● Kampus IV, Jl. Adam Malik KM 8.5, Sido Mulyo, Gading Cempaka, Kota Bengkulu, 38221 ● (0736) 22765
● fisip.umb.ac.id ● (0736) 26161
● fisipol@umb.ac.id

Nomor : 220-SI/DF.7/II.3.AU/C/2025
Lamp : 1 berkas
Perihal : Izin Penelitian

Bengkulu, 09 April 2025

Kepada Yth : Kepala BAWASLU Kota Bengkulu
Bengkulu
di
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, dengan ini kami sampaikan bahwa dalam rangka menunjang Penulisan Karya Ilmiah/Skripsi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Universitas Muhammadiyah Bengkulu, kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu/Saudar untuk dapat memberi izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama : Nedy Ramadhan Syaputra
NPM : 2163201003
Program Studi : Administrasi Publik

Untuk melaksanakan penelitian dengan judul "Peran Bawaslu Kota Bengkulu dalam Pelaksanaan PEMILU 2024" penelitian akan dilaksanakan di BAWASLU Kota Bengkulu dalam rangka menyusun Skripsi dari Tanggal 9 April 2025 – 9 Mei 2025.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama surat ini kami lampirkan proposal penelitian mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

A/n Dekan,
Wakil Dekan I FISIP

Rosidin, M.Si
NIP. 19820112 200904 1 080

● umb.ac.id
● humas@umb.ac.id
● 0822-3546-1991

● um bengkulu
● um bengkulu
● um Bengkulu

● um bengkulu
● umb tv
● Radio Jazirah FM 104,3 M.Hz



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU

Jl. Bayangkara No.40 RT.11 RW.08 Kel. Sidomulyo
Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu Kode Pos 38229
Email : bawaslukotabengkulu@gmail.com

Nomor : 01 /HM.02.04/K/04/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Surat Balasan

Bengkulu, 21 Mei 2025

Kepada Yth.
Dekan Universitas Muhammadiyah Bengkulu
di
Tempat

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat Universitas Muhammadiyah Bengkulu Nomor : 220-S1/DF.7/II.3.AU/C/2025 perihal Izin Penelitian Mahasiswa bernama Nedy Ramadhan Syafutra Program Study Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Bengkulu, dengan ini kami sampaikan bahwa mahasiswa tersebut dapat kami terima untuk melaksanakan Penelitian di Sekretariat Bawaslu Kota Bengkulu.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Koordinator Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bengkulu



Asneli, S.Kom

197109131997032005

Lampiran 2 Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

Biodata Informan:

Nama :

Umur :

Jabatan :

Pertanyaan Penelitian

1. Apa saja bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Bengkulu dalam Pemilu 2024?
2. Bagaimana mekanisme kerja Bawaslu dalam melakukan pengawasan selama tahapan Pemilu berlangsung?
3. Metode apa yang digunakan Bawaslu untuk mencegah pelanggaran Pemilu 2024?
4. Bagaimana Bawaslu menindaklanjuti temuan atau laporan pelanggaran selama proses Pemilu?
5. Bagaimana masyarakat atau pemantau independen berkontribusi pada tugas pengawasan Bawaslu?
6. Apa masalah yang paling sering dihadapi oleh Bawaslu Kota Bengkulu selama mengawasi Pemilu 2024?
7. Apakah terdapat kendala dalam hal sumber daya manusia (SDM), seperti jumlah personel atau kapasitas petugas pengawas?
8. Bagaimana kondisi anggaran atau pendanaan memengaruhi pelaksanaan tugas pengawasan Bawaslu?
9. Apakah sulit untuk mencapai area tertentu atau wilayah pengawasan yang luas?
10. Bagaimana Bawaslu menangani tantangan administratif atau teknis selama pengawasan?
11. Apakah ada intervensi atau tekanan politik yang dirasakan selama melaksanakan tugas pengawasan?

12. Bagaimana tanggapan publik terhadap tindakan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu? Apakah ada masalah dengan partisipasi publik? Dan Bagaimana Bawaslu mengatasi hambatan-hambatan tersebut?

Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian



